



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2025 – 2026



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dapat diselesaikan.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Kami menyadari bahwa Renstra DPMPTSP ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak penyempurnaan dokumen ini. Diharapkan Renstra DPMTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ba'a, Januari 2024

Kepala DPMPTSP Kab. Rote Ndao,



Daud Daniel Bessie, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690811 199801 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN ROTE NDAO.....	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP.	6
2.2 Sumber Daya DPMPTSP	15
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	21
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP	35
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao	35
3.2 Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2026	37
4.2 Cascading kinerja Bapelitbangda	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATN DAN SUBKEGIATAN,SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
7.1 Target Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2026	47
7.2 Target Kinerja Pelenggaraan Urususan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui IKK	47
BAB VIII PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Keadaan PNS DPMPTSP Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	16
Tabel 2.2	Keadaan PNS DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Pangkat, Golongan dan JabatanTahun 2024.....	17
Tabel 2.4	Jumlah Tenaga Kontrak DPMPTSP Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	18
Tabel 2.5	Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2023.....	19
Tabel 2.6	Target dan Realisasi DPMPTSP Tahun 2019-2024	22
Tabel 2.7	Capaian Renstra DPMPTSP Tahun 2019-2024	28
Tabel 3.1	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran, Indikator DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao	37
Tabel 4.2	Cascading DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026	38
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.....	42
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan serta Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026	44
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPTSP yang mengacu padaTujuan dan Sasaran RPD.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Selanjutnya, RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 064);
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh DPMPTSP selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3.2. Tujuan

Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao.
- c. Merumuskan prioritas program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan:
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan:
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)
- 3.2 Isu Strategis
Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- 4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN ROTE NDAO

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021).

Sebagai lembaga teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, maka DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok “ Membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

DPMPTSP merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas PMPTSP, mempunyai Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Dinas yang didukung oleh : 1 (satu) Sekretaris membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian yang berfungsi sebagai *supporting staf*, yaitu : 1. Kasubag. umum dan

Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional (2 orang), 1 Orang Koordinator Substansi Penanaman Modal membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, 1 Orang Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu.

a. Susunan Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Terisi)
2. Sekretaris (terisi); membawahi 1 Kasubag. (terisi), 2 kelompok fungsional (terisi)
3. 1 Orang Koordinator Substansi Penanaman Modal (terisi) membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal. (terisi);
4. 1 Orang Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (terisi) membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal. (terisi);

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. menyusun rencana penjabaran kebijakan, mengatur pelaksanaan program dan melakukan pembinaan teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan penanaman modal daerah;
- e. mengendalikan penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala DPMPTSP membawahi Sekretaris, Koordinator Substansi Penanaman Modal , Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Sekretaris membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset), Sub Koordinator Perencana Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu gembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretariats mempunyai fungsi :

- a. membuat rencana operasional Sekretaris berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. membagi tugas di Sekretariat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
- c. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan target yang direncanakan;
- d. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas di Sekretariat dengan membandingkan rencana, peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil yang diharapkan;
- e. melaporkan kegiatan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset) dan Sub Koordinator Perencana Substansi Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

3. Koordinator Substansi Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal di pimpin oleh oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP. Koordinator Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Penanaman Modal kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud . Koordinator Substansi Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator

4. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

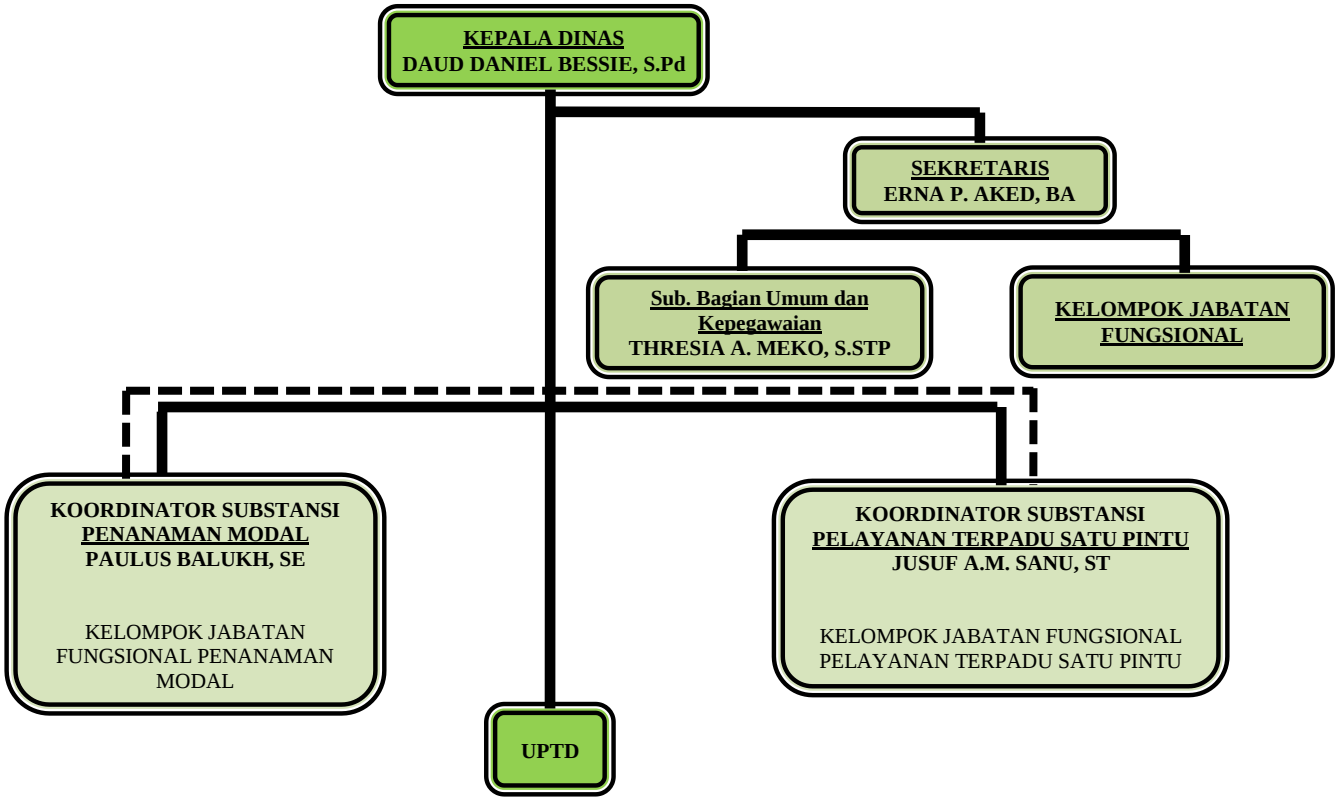
Bidang Pelayanan Perijinan di pimpin oleh oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP. Koordinator Substansi Bidang Penanaman Modal di pimpin oleh oleh seorang Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pelayanan Perijinan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud . Koordinator Substansi Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator Penata Perizinan

2.1.2. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 seperti gambar berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024



Keterangan :
———— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

Sumber data: DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

2.2. Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional. Berdasarkan data terakhir Desember 2023 jumlah pegawai tetap (PNS) sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian pengisian golongan ruang, pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3, sedangkan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) sebanyak 6 (Enam) orang berdasarkan data per 31 Desember 2023.

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari 11 (Sembilan belas) orang laki-laki dan 12 (sepuluh) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kab. Rote Ndao
Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/c	Pembina Utama Muda	1	-	1
2	IV/b	Pembina Tk.1		1	1
3	IV/a	Pembina	3	1	3
Jumlah Golongan IV			4	2	6
3	III/d	Penata Tk I	4	5	9
4	III/c	Penata		1	1
5	III/b	Penata Muda Tk I	1	2	3
6	III/a	Penata Muda	2	2	4
Jumlah Golongan III			7	9	17
TOTAL			11	11	23

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN DPMPTSP Kab. Rote Ndao sebanyak 23 (dua puluh Tiga) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 3 (enam) orang, golongan III sebanyak 17 (enam belas) orang. Sedangkan keadaan pegawai DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	-	-	-
2	S2	-	-	-
3	S1	9	9	18
4	D III		1	1
5	SLTA/SMK	2	2	4
Total		11	12	23

Sumber Data : DPMPTSP Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari S1 berjumlah 17 (tujuh belas) orang, DIII berjumlah 1 (satu) orang dan SLTA/SMK berjumlah 4 (empat) orang. Sedangkan susunan kepegawaian pada DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah pegawai DPMPTSP Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Jabatan
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Daud D. Bessie, S.Pd	Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas	S1	
2	Erna P. Aked, BA	Pembina Tk.1/ IV b	Sekretaris	D3	
3	Paulus Balukh, SE	Pembina / IV a	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Penanaman Modal)	S1	
4	Justus Sakan, SH	Pembina / IV a	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S1	
5	Jusuf A. M. Sanu, ST	Pembina / IV a	Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator PTSP)	S1	
6	Senisulita Lami, SE	Penata Tk I / IV a	Analisis Kebijakan Ahli Madya	S1	
7	Yulensi A. Amalo, SH	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub koordinator Evaluasi dan	S1	

			Pelaporan)		
8	Thresia A. Meko, S.STP	Penata Tk I / III d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1	
9	Carolina P. Fanggidae, SE	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Fasilitas Kemitraan Dunia Usaha)	S1	
10	Yeli E. Foeh, SE	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal)	S1	
11	Petronela Giri,SE	Penata Tk I / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pemantauan dan Pembinaan)	S1	
12	Sarina Saudale, SE	Penata Tk I / III d	Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1	
13	Gustan Bessie, SE	Penata / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Non Perijinan	S1	
14	Husain Mitan, S.Sos	Penata / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Keuangan & Aset)	S1	
15	Sony Anin, SE	Penata / III d	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pelayanan Perijinan)	S1	
16	Sherly Ndun, SE	Penata / III c	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan	S1	

			Penanaman Modal)		
17	Yulia Mansula, SH	Penata Muda Tk.1/III b	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Informasi dan Pelayanan Pengaduan)	S1	
18	Dedy Ph. E Manafe, SE	Penata Muda Tk.1/ IIIb	Pelaksana	S1	
19	Derliana N. Bora, SE	Penata Muda Tk.1/ IIIb	Pelaksana	S1	
20	Miswar Simin	Penata Muda/ IIIa	Pelaksana	SMA	
21	Jeri Fiharudin	Penata Muda/ IIIa	Pelaksana	SMA	
22	Merni S. Adoe	Penata Muda/ IIIa	Pelaksana	SMA	
23	Susana Killa	Penata Muda, III/a	Pelaksana	SMA	

Sumber Data : DPMPSTSP Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan operasional DPMPSTSP Kabupaten Rote Ndao di dukung tenaga kontrak daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Tenaga Kontrak DPMPSTSP Berdasarkan Jabatan Dan Jenis Kelamin
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Richard Wenno	Sopir	1	-	1
2	Aris A. Toulasik	Penjaga Kantor	1	-	1
3	Yopi Bauana, S.Si	Operator Aplikasi Perijinan	1	-	1
4	Dance Lian, SE	Operator Aplikasi Perijinan	1	-	1
5	Jenifen A. Ndaong, SH	Tenaga Administrasi	-	1	1
6	Irma N. Johanis	Operator Komputer	-	1	1
Total			4	2	6

Sumber Data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2023

Dilihat dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kontrak di DPMPSTSP Kabupaten Rote Ndao berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang menduduki jabatan penjaga kantor sebanyak 1 (satu) orang, sopir 1 (satu) orang, tenaga administrasi 1 (satu) orang, Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang dan Operator Aplikasi Perijinan sebanyak 2 (dua) orang.

2. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, mobil dinas Kepala Badan /mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya.

Kelancaran Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rote Ndao di dukung sarana, prasarana, peralatan kantor dan aset berjumlah 472 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua) unit berdasarkan data per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5.
Daftar Aset DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

NO	NAMA /JENIS BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JLH BARANG	KEADAAN BARANG (B/KB/RB)
A.	KENDARAAN RODA EMPAT			
1	MINIBUS	2011	1	B
	JUMLAH		1	
B.	KENDARAAN RODA DUA			
	HONDA WIN	2004	1	RB
	HONDA WIN	2004	1	RB
	HONDA KHARISMA	2006	1	RB
	HONDA REVO	2010	1	RB
	SUZUKI UY 125	2010	1	KB
	HONDA REVO	2011	1	RB
	HONDA REVO	2011	1	RB
	HONDA REVO	2011	1	RB

	HONDA REVO	2013	1	KB
	JUMLAH		9	
C.	DATA ASET			
1.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2004	1	RB
2.	Mesin Ketik Manual Longewagen-18	2004	1	RB
3.	Brand Kas	2004	1	RB
4.	Lemari Kaca	2004	1	RB
5.	Lemari Kaca	2004	1	RB
6.	Lemari kayu	2004	1	RB
7.	Papan Nama Instansi	2004	1	RB
8.	Papan Nama Instansi	2004	1	RB
9.	Papan Pengumuman	2004	1	RB
10.	Panel Pameran	2004	1	RB
11.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2004	2	RB
12.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2004	1	RB
13.	Papan Nama Ruangan/Jabatan	2004	1	RB
14.	Kursi Besi/Metal	2004	1	RB
15.	Kursi Besi/Metal	2004	1	RB
16.	Kursi Besi/Metal	2004	1	RB
17.	Kursi Besi/Metal	2004	10	RB
18.	Kursi Besi/Metal	2004	1	RB
19.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2004	1	RB
20.	Kursi Putar	2004	10	RB
21.	Meja Biro	2004	1	RB
22.	Meja Biro	2004	7	RB

23.	Kaca Bening	2004	1	RB
24.	Jam Elektronik	2004	7	RB
25.	Kipas Angin	2004	1	RB
26.	Alat Dapur Lainnya	2004	2	RB
27.	Televisi	2004	6	RB
28.	Wireless	2004	1	RB
29.	Camera Film	2004	1	RB
30.	Kaca Hias	2004	1	RB
31.	Dispenser	2004	2	RB
32.	Lampu Emergency	2004	1	RB
33.	P.C Unit/ Komputer PC	2004	2	RB
34.	Printer	2004	2	RB
35.	Camera + Attachment	2004	1	RB
36.	Pesawat Telephone	2004	2	RB
37.	Facsimile	2004	1	RB
38.	Lambang Negara (Garuda)	2004	1	RB
39.	Gambar Presiden	2004	1	RB
40.	Gambar Wakil Presiden	2004	1	RB
41.	Scanner	2005	1	RB
42.	Filling Besi/Metal	2005	2	RB
43.	Rak Kaca	2005	2	RB
44.	Lemari Kayu	2005	1	RB
45.	Kursi Lipat	2005	7	RB
46.	Meja Komputer	2005	2	RB
47.	Meja Biro	2005	3	RB
48.	Meja Biro	2005	1	RB
49.	Meja Biro	2005	3	RB
50.	Kaca Bening	2005	7	RB
51.	Kipas Angin	2005	1	RB

52.	Kipas Angin	2005	2	RB
53.	P.C Unit/ Komputer PC	2005	1	RB
54.	Personal Komputer Lain-lain	2005	1	RB
55.	Printer	2005	1	RB
56.	Printer	2005	1	RB
57.	Server	2005	1	RB
58.	Hub	2005	1	RB
59.	Modem	2005	1	RB
60.	Lensa Kamera	2005	1	RB
61.	Alat Pengangkat Lain-lain	2006	1	RB
62.	Papan Nama Instansi	2006	3	RB
63.	Overhead Projektor	2006	1	RB
64.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2006	20	RB
65.	Lemari Kayu	2006	2	RB
66.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2006	1	RB
67.	Meja Rapat	2006	10	RB
68.	Kursi Lipat	2006	10	RB
69.	Meja Biro	2006	1	RB
70.	Meja Biro	2006	2	RB
71.	Sofa	2006	1	RB
72.	Kaca Bening	2006	1	RB
73.	AC Unit	2006	3	RB
74.	Stabilisator	2006	1	RB
75.	Dispenser	2006	1	RB
76.	Printer	2006	1	RB
77.	UPS	2006	2	RB
78.	Layar Proyektor	2006	1	RB
79.	Wireless Amplifier	2006	1	RB
80.	Fibertec Holdher (Stainless	2006	1	RB

	Steel 1000 ML)			
81.	Mesin Ketik Manual Longewagen -18	2007	1	RB
82.	Mesin Calculator	2007	2	RB
83.	Lemari Kaca	2007	1	
84.	Alat Kantor Lainnya (Terali Besi)	2007	5	
85.	Jam Elektronik	2007	1	RB
86.	Jam Elektronik	2007	1	RB
87.	Note Book	2007	1	RB
88.	Flashdisk	2007	2	RB
89.	UPS	2007	1	RB
90.	Fibertec Holdher (Stainless Steel 1000 ml)	2007	1	RB
91.	Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi	2007	2	RB
92.	Ekonom	2007	5	RB
93.	Hukum	2007	5	RB
94.	Perdagangan	2007	3	RB
95.	Teknologi	2007	4	RB
96.	Terbitan Berkala Lain-lain	2007	1	RB
97.	Mesin Calculator	2008	1	RB
98.	Papan Nama Instansi	2008	3	RB
99.	AC Unit	2008	1	RB
100.	AC Unit	2008	1	RB
101.	Hard Disk	2008	2	RB
102.	Printer	2008	3	RB
103.	UPS	2008	2	RB
104.	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2008	2	
105.	Camera + Attachment	2008	1	RB
106.	Facsimile	2008	1	RB

107.	Mesin Calculator	2009	3	RB
108.	Papan Nama Instansi	2009	1	RB
109.	Papan Nama Instansi	2009	1	RB
110.	Lemari Kayu	2009	1	
111.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2009	3	
112.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2009	60	
113.	Meja Biro	2009	3	
114.	Jam Elektronik	2009	1	RB
115.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2009	1	RB
116.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	10	RB
117.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	50	RB
118.	Printer	2009	3	RB
119.	Mouse	2009	2	RB
120.	Mesin Calculator	2010	1	RB
121.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2010	3	
122.	Meja Biro	2010	2	
123.	Meja Biro	2010	1	
124.	Meja Biro	2010	1	
125.	Meja Biro	2010	1	
126.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2010	2	RB
127.	Note Book	2010	2	RB
128.	Printer	2010	1	RB
129.	Printer	2010	2	RB
130.	Keyboard	2010	1	RB
131.	UPS	2010	2	RB
132.	Harddisk Internal	2010	2	RB
133.	Harddisk Internal	2010	1	RB
134.	Mesin Calculator	2011	1	RB

135.	Lemari Kayu	2011	3	
136.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2011	4	
137.	Meja Biro	2011	4	
138.	Note Book	2011	2	
139.	Printer	2011	1	
140.	Camera + Attachment	2011	1	
141.	Mesin Hitung Manual	2012	1	
142.	Lap Top	2012	1	
143.	Printer	2012	1	
144.	Mesin Hitung Manual	2013	2	
145.	P.C Unit/ Komputer PC	2013	1	
146.	Lap Top	2013	1	
147.	Printer	2013	2	
148.	Facsimile	2013	1	
149.	Lap Top	2015	1	
150.	Mesin Cetak Listrik Elektronik	2015	1	
151.	Mesin Hitung Manual	2016	2	
152.	Kursi Kerja	2016	7	
153.	Lap Top	2016	3	
154.	Printer	2016	2	
155.	Meja Kerja	2016	7	
156.	Laptop	2017	3	
157.	Printer	2017	2	
158.	Printer	2017	4	
159.	Printer	2018	2	
160.	Peralatan Mini Komputer	2018	1	
161.	Laptop	2019	1	
162.	Komputer PC	2019	3	
163.	Lap Top	2019	1	

164.	Printer A 4	2019	2	
165.	Printer A 3	2019	1	
166.	Laptop	2019	1	
167.	AC 1 Pk	2019	3	
	JUMLAH		472	
D	GEDUNG			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2004	1	B
2	Bangunan Gedung Tempat Tempat Pertemuan / Aula	2008	1	B
	JUMLAH		2	

Sumber Data: DPMPTSP Kab. Rote Ndao Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut:

TABEL 2.6.																
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPSTP TAHUN 2021-2023																
INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET SPM	TARG ET IKU	TARGET IKK	TARGET INDIKA TOR		TARGET RENSTRA TAHUN				REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN		
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
Meningkatnya Investasi Berskala Nasional						66	70	75,00		60	74	80		91	106	107
Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)						160.000.000	165.000.000	170.000.000		493.030.235.000	788.394.339.000,0	906.968.735.000		308.144	477.815	533.511
Realisasi Investasi PMDN/PMA						100.000.000.000	100.000.000.000	105.000.000.000		119.440.795.389	64.423.980.161	282.535.057.143		119	64	269
Persentase Bangunan/Usaha Berijin						60	70	80		115,87	104	140,29		193	149	175

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2021 – 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	8		9		10		13		14		15	
	Sasaran Meningkatnya Ekonomi Unggulan Daerah dan iklim Investasi													
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100	%	100	##### #	100	##### #	100	##### #
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100	%	100	%	100	%	100	##### #	100	##### #	100	##### #
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19	Dok	19	Dok	19	Dok	19	35.817.300	19	51.135.000	19	44.870.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	12	Dok	12	Dok		30.000.000	12	25.878.700	12	38.160.000		30.000.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12	Dok					12	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	7	Dok	7	Dok		14.870.000	7	9.938.600	7	12.975.000		14.870.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7	Laporan					7	
2	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Tersusunnya revisi Renstra, Renja, Profil OPD, LKIP, LPPD, RKA, LKPJ, Evaluasi Renja												
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28	Org/Bln	28	Org/Bln	27	1.684.939.836	28	#####	28	1.738.401.733	27	##### ##
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28	Bulan	28	Org/Bln	21	1.621.111.836	28	#####	28	1.678.120.733	21	##### ##
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	6	Org	7	Org	6	63.828.000	6	46.800.000	7	60.281.000	6	63.828.000

5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Org/Bln	4.200.000	1	Org/Bln	4.200.000	1	Dok	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	1	Org/Bln	4.200.000	1	Org/Bln	4.200.000	1	Org/Bln	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							1	Dok					1		
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	6	Org/Bln	75.000.000	12	Org/Bln	75.000.000			-	6	75.000.000	6	71.250.000		-
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Daerah	6	Org/Bln	75.000.000	6	Org/Bln	75.000.000			-	6	75.000.000	6	71.250.000		-
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	60.779.850	100	%	94.432.000	100	%	64.126.000	100	60.335.082	100	94.431.139	100	64.126.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Unit	490.050	1	Paket	500.000	1	Paket	500.000	1	490.050	1	500.000	1	500.000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	96	Buku	5.899.740	331.980	Lembar	5.700.000	22.680	Lembar	5.186.000	96	5.899.500	331.980	5.700.000	22.680	5.186.000
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bln	375.000			-	-		-	12	300.000				-
9	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	7.433.060							12	7.401.960				
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan								12					
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor				12	Bulan	7.435.000	12	bln	5.236.000			12	7.435.000	12	5.236.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	9	Kali	46.582.000	13	Kali	80.797.000	11	Kali	53.204.000	9	46.243.572	13	80.796.139	11	53.204.000
11	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Kali	27.978.500	100	%	27.482.500	100	%	25.678.500	100	19.102.409	100	18.555.194	100	19.444.613
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	12	Bln	1.496.000	83	Lembar	1.000.000	83	Lembar	996.000	12	1.496.000	83	988.000	83	996.000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air	12	bln	26.482.500	12	Bln	26.482.500	12	bln	24.682.500	12	17.606.409	12	17.567.194	12	18.448.613

		Jumlah Belanja Listrik											
		Jumlah Langganan Internet											
1 3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	29.409.000	100 %	81.137.700	100 %	67.350.000	100	29.075.660		79.231.700	100 67.350.000
1 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	6 Unit	29.409.000	5 Unit	51.138.700	12 bln	41.350.000	6	29.075.660	5	49.232.700	5 41.350.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				1 Gedung	29.999.000					1	29.999.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4 Unit	26.000.000					4 26.000.000
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi dan pendataan potensi investasi daerah		36.029.540		40.000.000		10.072.000		35.239.200			9.888.000
1 5	Penyelenggaraan Promosi Penanman Modal yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	100 %	36.029.540	100 %	40.000.000	100 %	10.072.000	100	35.239.200	100	40.000.000	100 9.888.000
2 0	Pelaksanaan Kgiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Kali	36.029.540	1 Kali	40.000.000	1 Kegiatan	10.072.000	2	35.239.200	1	40.000.000	1 9.888.000
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan	100 %	122.557.830	100 %	153.998.530	100 %	112.758.000	100	121.845.050	100	152.628.423	100 112.758.000
2 7	Pelayanan Perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Resiko	1.550 Dok	122.557.830	1550 Ijin	153.998.530	500 Laporan	112.758.000	1.550	121.845.050		152.628.423	690 112.758.000
3 0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan dan Non Perijinan Penanaman modal	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Resiko	1.550 Ijin	122.557.830	1.550 Ijin	153.998.530	500 Ijin Usaha	112.758.000	1.550	121.845.050	1.550	152.628.423	500 112.758.000

V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketaatan Berinvestasi		392.223. 000		388.654. 000		542.600. 000		378.394.709		374.470. 973		529.336.9 00
28	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi		392.223. 000		388.654. 000		542.600. 000		378.394.709		374.470. 973		529.336.9 00
29	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis resiko dan pengawasan perijinan berbasis resiko	25 PMA	55.090.0 00		-		-	25	54.646.442		-		
30	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan, eserta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	8 Kegiatan	234.823. 000	60 PMA/P MDN	208.214. 000	60 PMA/P MDN	262.995. 000	8	221.523.267	74	201.465. 973	80	255.061.9 00
31	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan, eserta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	13 Kali	102.310. 000	60 Dok	180.440. 000	60 PMA/P MDN	279.605. 000	13	102.225.000	74	173.005. 000	80	274.275.0 00
			100 %	3.076.28 0.950	100 %	2.675.66 1.629	100 %	2.556.59 4.336	100	##### #	10 0	2.584.30 4.162	100	##### ###

Faktor pendorong pencapaian kinerja : Dsiplin Kerja
Faktor penghambat : Proses capaian Kinerja dan
anggaran harus sesuai dengan rencana anggaran kas

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2021 - 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian P			
			2021		2022		2021		2022	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	8		9				13	
	Sasaran Meningkatnya Ekonomi Unggulan Daerah dan iklim Investasi									
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran								
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor								
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						99,54		99
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD						99,42		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan						99,40		
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						70,11		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						70,11		

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD						100,00		
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100,00		
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah						100,00		
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan						100,00		95
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Daerah						100,00		
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						99,27		10
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100,00		
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						100,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						80,00		
9	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor						99,58		-
		Tersedianya Alat Tulis Kantor								
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor								10
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi						99,27		
11	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68,28		
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai						100,00		
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air						66,48		
		Jumlah Belanja Listrik								
		Jumlah Langganan Internet								
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						98,87		

15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional						98,87		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Terlaksananya Promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi dan pendataan potensi investasi daerah						97,81		
15	Penyelenggaraan Promosi Penanman Modal yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota						97,81		100
20	Pelaksanaan Kgiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota						97,81		
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan						99,42		
27	Pelayanan Perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Resiko						99,42		
30	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perijinan dan Non Perijinan Penanaman modal	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Resiko						99,42		99
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketaatan Berinvestasi						96,47		96
28	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi						96,47		96

29	Koordinasi dan sinkronisasi pemanntauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbngan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis resiko dan pengawasan perijinan berbasis resiko						99,19		-
30	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlaah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan, eserta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha						94,34		
31	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlaah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan, eserta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha						99,92		

Faktor pendorong pencapaian kinerja
Faktor penghambat
kas

: Dsiplin Kerja
: Proses capaian Kinerja dan anggaran harus sesuai dengan rencana anggaran

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

Berdasarkan hasil tabel 2.7 dapat dijelaskan realisasi anggaran DPMPSTSP selama tahun 2021-2023 dengan capaian di atas 97% dan capain kinerja sub kegiatan dengan realisasi 100%. untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja dan anggaran yang sudah optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DPMPSTSP Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Perguruan Tinggi, PMA?PMDN, BPS, dan lain-lain.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, jalan, sarana transportasi dan komunikasi) menuju lokasi kegiatan investasi sebagai salah satu daya tarik bagi calon investor untuk berinvestasi	Masih Rendahnya Minat Investor di Kabupaten Rote Ndao	Terbatasnya dana untuk menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur
2.	Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menguasai informasi dan teknologi, sistim aplikasi pelayanan perizinan, <i>Online Single Submission</i> (OSS) serta operator SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya;	Belum optimalnya implementasi system informasi dan pelayanan perizinan secara <i>online</i> termasuk pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS); SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya;	Kurangnya anggaran untuk Bimtek ASN Pengelola Pelayanan Perizinan

3.	Belum optimalnya promosi potensi daerah melalui informasi dan penyajian bahan pameran serta data penunjang lainnya;	Kurangnya informasi potensi daerah	Masih terbatasnya anggaran untuk promosi potensi daerah.
4.	Masih terbatasnya Anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	Kurangnya kajian-kajian potensi dan peluang investasi baru, promosi, pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan PMA dan PMDN yang tersebar di desa/kecamatan pada Kab.Rote Ndao	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak berjalan maksimal

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis DPMPSTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, jalan, sarana transportasi dan komunikasi) menuju lokasi kegiatan investasi sebagai salah satu daya tarik bagi calon investor untuk berinvestasi;
2. Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menguasai informasi dan teknologi, sistim aplikasi pelayanan perizinan, *Online Single Submission* (OSS) serta operator SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya;
3. Belum optimalnya promosi potensi daerah melalui informasi dan penyajian bahan pameran serta data penunjang lainnya;
4. Masih terbatasnya Anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pada Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao

4.1.1. Tujuan

Tujuan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatkan Investasi Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 antara lain:

1. Meningkatnya Investasi di Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan

Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator DPMPSTSP Kabupaten Rote Ndao

N O	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATO R TUJUAN / SASARAN	SPM/IKK/ILAINN YA	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN			REALISASI	TARGET			
							2023	2024	2025	2026	2026
	Meningkatn ya Pertumbuha n Ekonomi dan Kesejahtera an Sosial Masyarakat	Meningkatn ya ekonomi unggulan daerah dan pendapatan asli daerah			Realisasi Investasi Daerah		282	282	296	311	311
			Meningkatkn ya Investasi daerah dan Pelayanan terpadu Satu pintu	Meningkatn ya Investasi Daerah	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)		87,97	90,00	95,00	100,00	100,00
					Persentase meningkatn ya investasi berskala nasional		8,11	9,00	10,00	11,00	11,00
					Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PM A)		906.968.735.00 0	952.317.171.75 0	999.933.030.33 8	1.049.929.681.85 4	1.049.929.681.854
				Meningkatny a Pelayanan Perizinan	Persentase Bangunan/ Usaha Berijin		140,29	147,30	154,67	162,40	162,40

4.2. Cascading Kinerja DPMPTSP Tahun 2025-2026

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indicator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2026

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA AWAL TAHUN 2024	TARGET KINERJA			UNIT KERJA/BIDANG
							TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Investasi daerah dan Pelayanan terpadu Satu pintu										
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100	%				
				Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100	%				
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	Dok	12	12	12	24	
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	Laporan	7	7	7	7	
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bln	22	16	16	22	
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	Dokumen	16	16	16	32	
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	Org/Bln	1	1	1	2	
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat						

		Daerah						
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	2	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	1	2	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	1	1	1	2	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1	1	2	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	Laporan	16	16	18	34	
5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air, Listrik dan Telpon	Laporan	12	12	12	24	
		Jumlah Belanja Listrik dan Telpon						
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	Unit	4	4	4	4	
Meningkatnya Investasi Daerah								
	II PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Jumlah investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ke daerah						
7	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	Meningkatnya Pelayanan Perizinan						
13	Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	3	5	
Meningkatnya Pelayanan Perizinan								
	III PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan	100				%	

	8	Pelayanan Perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi dan pendataan potensi investasi daerah	kegiatan usaha	500	500	1500	500	
	1 4	Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Resiko	kegiatan usaha	500	500	1500	2000	
	Meningkatnya Investasi Daerah								
	V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketaatan Berinvestasi						
	9	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi	Pelaku Usaha	75	75	80	155	
	1 5	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimngan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis resiko dan pengawasan perijinan berbasis resiko	Pelaku Usaha	75	75	80	155	
	1 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlaah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan, eserta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Pelaku Usaha	75	75	80	155	
				100	%	-	100	%	-

Faktor pendorong pencapaian kinerja

Faktor penghambat

rencana anggaran kas

: Dsiplin Kerja

: Proses capaian Kinerja dan anggaran harus sesuai dengan

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : -

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

- 1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di wilayah Kabupaten Rote Ndao ;
- 2) Mengintensifkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi ;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, pembiayaan, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan ;
- 5) Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien ;
- 6) Mendorong para investor untuk membangun kemitraan investasi dengan UMKM, masyarakat dan pemerintah, serta mengoptimalkan dan memberdayakan penggunaan tenaga kerja lokal ;
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan masyarakat sebagai penyertaan modal dengan sistem pembagian hasil secara proposional;
- 8) Meningkatkan kualitas ketersediaan sumber daya yang ada baik SDM, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan ;
- 9) Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi penanam modal (lahan, pajak, perijinan, perlindungan hukum, tenaga kerja serta program);

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
- 2) Mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan Informasi, Komunikasi dan Teknologi ;
- 3) Mendorong investasi di daerah untuk meningkatkan nilai tambah potensi sector unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industri atau pabrik ;
- 4) Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat;
- 5) Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam Propinsi maupun luar Propinsi
- 6) Meningkatkan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berbasis kerakyatan;
- 7) Mendorong peningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi.
- 8) Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao seperti pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPTSP Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan			
Misi : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkannya investasi daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan public	Meningkatkan kualitas pelayanan public	1. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas berbasis IT
	Meningkatnya investasi	Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi	1. Meningkatkan data base potensi unggulan daerah 2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	1. Meningkatkan kinerja aparatur di bidang pelayanan perizinan yang andal dan profesional 2. Menciptakan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan perizinan terpadu agar sesuai tuntutan dan kepentingan masyarakat.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPSTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkannya investasi daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatnya transparansi dan tanggungjawab pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas berbasis IT
	Meningkatnya investasi	Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi	Meningkatkan data base potensi unggulan daerah
			Menciptakan iklim usaha yang kondusif
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan kinerja aparatur di bidang pelayanan perizinan yang andal dan profesional
			Menciptakan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan perizinan terpadu agar sesuai tuntutan dan kepentingan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan DPMPSTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026

TUJUA N	SASARAN		PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	TARGET KINERJA AWAL TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PD PENANGU NGJAWAB	LO KA SI	
								TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kond. Knjpd akhir periode Renstra PD				
						TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP	TAR GET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11					
Mening katknya Investa si daerah dan Pelayan an terpadu Satu pintu																
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100					2.030.0 00.000		2.050.3 00.000		4.080.3 00.000	SEKERETARI AT	RO TE ND AO
				Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100		2.020.76 4.963									
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			56.070.0 00		56.070. 000		57.900. 000		113.970. 000			
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	Dok	12	38.170.0 00	12	38.170.0 00	12	40.000.0 00	24	78.170.0 00			
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	Lapora n	7	17.900.0 00	7	17.900.0 00	7	17.900.0 00	14	35.800.0 00			
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.786.70 8.463		1.786.70 8.463		1.786.70 8.463	0	3.573.41 6.926			
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bl n	22	1.720.40 8.463	22	1.720.40 8.463	22	1.720.40 8.463	44	3.440.81 6.926			

		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	Doku men	16	66.300.000	16	66.300.000	16	66.300.000	32	132.600.000		
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Org/Bln	6	4.200.000	6	4.200.000	6	4.200.000	12	8.400.000		
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	Org/Bln	1	4.200.000	1	4.200.000	1	4.200.000	2	8.400.000		
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	86.939.000	100	96.174.037	100	114.644.037	200	210.818.074		
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	500.000	1	500.000	1	500.000	2	1.000.000		
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2.300.000	1	11.535.037	1	15.000.000	2	26.535.037		
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	1	7.472.000	1	7.472.000	1	7.472.000	2	14.944.000		
		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	6.200.000	1	6.200.000	1	6.200.000	2	12.400.000		
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	Lapor an	16	70.467.000	16	70.467.000	16	85.472.037	32	155.939.037		
		5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	24.682.500	100	24.682.500	100	24.682.500	200	49.365.000		
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah BelanjaAir, Listrik dan Telpon	Lapor an	12	24.682.500	12	24.682.500	12	24.682.500	24	49.365.000		
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	62.165.000	100	62.165.000	100	62.165.000	200	124.330.000		

		1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	Unit	4	62.165.000	4	62.165.000	4	62.165.000	4	124.330.000		
		Meningkatnya Investasi Daerah													
		II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Jumlah investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ke daerah			85.236.000		85.236.000		90.900.000		176.136.000	PENANAMAN MODAL	ROTE NDAO
		7	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota	Terlaksananya Promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi dan pendataan potensi investasi daerah	%	100	85.236.000		85.236.000	3	90.900.000	5	176.136.000		
		1 3	Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	85.236.000	2	85.236.000	3	90.900.000	5	176.136.000		
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan													
		II I	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan	100		141.440.000		141.440.000		151.500.000		292.940.000	PERIJINAN	ROTE NDAO
		8	Pelayanan Perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	kegiatan usaha	500	141.440.000	500	141.440.000	1500	151.500.000	2000	292.940.000		
		1 4	Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis,	kegiatan usaha	500	141.440.000	500	141.440.000	1500	151.500.000	2000	292.940.000		

			evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berbasis Resiko											
		Meningkatnya Investasi Daerah												
	V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketaatan Berinvestasi			145.000.000		145.000.000		151.500.000		296.500.000	PENANAMAN MODAL	ROTE NDAO
	9	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketaatan Berinvestasi	Pelaku Usaha	75	145.000.000	75	145.000.000	80	151.500.000		296.500.000		
	15	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis resiko dan pengawasan perijinan berbasis resiko	Pelaku Usaha	75	45.000.000	75	45.000.000	80	45.000.000	155	90.000.000		
	16	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlaah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi lapangan, eserta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Pelaku Usaha	75	100.000.000	75	100.000.000	80	106.500.000	155	206.500.000		
				100		%		100		100		%		

Faktor pendorong pencapaian kinerja
: Dsiplin Kerja

Faktor penghambat : Proses
capaian Kinerja dan anggaran harus sesuai dengan rencana anggaran kas
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota
berikutnya : -
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota berikutnya : -

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Indikator kinerja tujuan dan sasaran ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indikator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut:

7.2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah DPMPTSP Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bapelitbangda Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1							
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026							
N O	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATU AN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
			REALISASI	TARGET			
			2023	2024	2025	2026	2026
1	Realisasi Investasi Daerah	Rp	282	282	296	311	311
2	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)		87,97	90,00	95,00	100,00	100,00
3	Persentase meningkatnya investasi berskala nasional		8,11	9,00	10,00	11,00	11,00
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		906.968.735.000	952.317.171.750	999.933.030.338	1.049.929.681.854	1.049.929.681.854
5	Persentase Bangunan/ Usaha Berijin		140,29	147,30	154,67	162,40	162,40

Tabel 7.2							
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026							
N O	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATU AN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
			REALISASI	TARGET			
			2023	2024	2025	2026	2026
ASPEK PELAYANAN UMUM							
	PENANAMA N MODAL						
1	Realisasi investasi PMDN/PMA	%	283	283	296	311	311
2	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	%	87,97	90,00	95,00	100,00	100
3	Persentase meningkatnya investasi berskala nasional	%	8,11	9,00	10,00	11,00	11
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	906.968.735.000	952.317.171.750	999.933.030.338	1.049.929.681.854	1.049.929.681.854

5	Persentase Bangunan/Usaha Berijin	%	140,29	147,30	154,67	162,40	162,40
6	Perda Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten		-	-	1	-	1

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 guna mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao 2025-2026 dan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao.

Ba'a, Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Rote Ndao



Daud Daniel Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199801 1 002